BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 harus diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5534);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26/Menkes/SK/I/2013 tentang Penerima dan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2013;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
47. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2012 twntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 62 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 2.206.255.013.774,00 bertambah sejumlah Rp 180.377.207.166,36 sehingga menjadi Rp 2.386.632.220.940,36, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.136.043.749.797,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp	97.645.223.431,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp 2.233.688.973.228,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.160.998.832.629,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp	179.445.734.743,36	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp 2.340.444.567.372,36
Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp (106.755.594.144,36)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) Semula	Rp	70.211.263.977,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	82.731.983.735,36	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 152.943.247.712,36

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp	45.256.181.145,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	931.472.423,00		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	46.187.653.568,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp	106.755.594.144,36
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp	204.762.331.101,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	45.641.231.767,00		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp	250.403.562.868,00

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp	1.514.858.256.834,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.084.837.080,00		
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp	1.517.943.093.914,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1) Semula	Rp	416.423.161.862,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	48.919.154.584,00		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan			Rp	465.342.316.446,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :

1) Semula	Rp	55.195.751.341,40		
2) Bertambah/berkurang	Rp	15.000.000.000,96		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp	70.195.751.342,36

b. Retribusi daerah :

1) Semula	Rp	22.975.670.003,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(3.470.575.860,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp 19.505.094.143,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	7.158.826.061,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	31.361.459,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 7.190.187.520,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

1) Semula	Rp	119.432.083.695,60	
2) Bertambah/berkurang	Rp	34.080.446.167,04	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp 153.512.529.862,64

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil :

1) Semula	Rp	111.727.599.834,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.084.837.080,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 114.812.436.914,00

b. Dana alokasi umum :

1) Semula	Rp	1.305.617.257.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 1.305.617.257.000,00

c. Dana alokasi khusus :

1) Semula	Rp	97.513.400.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 97.513.400.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	5.000.000.000,00		
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp	5.000.000.000,00

c. Dana darurat :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp	0,00

d. Dana bagi hasil pajak :

1) Semula	Rp	63.429.147.130,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	27.612.155.536,00		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp	91.041.302.666,00

e. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :

1) Semula	Rp	312.364.014.732,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(14.195.572.232,00)		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp	298.168.442.500,00

f. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah :

1) Semula	Rp	40.630.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	30.502.571.280,00		
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsin atau dari Pemerintah lain setelah perubahan			Rp	71.132.571.280,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp	1.506.266.469.057,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	25.319.086.147,00		
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp	1.531.585.555.204,00

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp	654.732.363.572,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	154.126.648.596,36		
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp	808.859.012.168,36

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula	Rp	1.245.481.275.264,32		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(40.338.405.453,00)		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	1.205.142.869.811,32

b. Belanja bunga :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp	0,00

c. Belanja subsidi :

1) Semula	Rp	5.033.704.200,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(5.033.704.200,00)		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp	0,00

d. Belanja hibah :

1) Semula	Rp	170.910.942.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	51.707.058.000,00		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	222.618.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial :

1) Semula	Rp	13.170.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	10.279.425.000,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	23.449.425.000,00

f. Belanja bagi hasil :

1) Semula	Rp	1.240.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(300.000.000,00)		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp	940.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan :

1) Semula	Rp	65.872.092.814,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	10.965.942.800,00		
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	76.838.035.614,00

h. Belanja tidak terduga :

1) Semula	Rp	4.558.454.778,68		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(1.961.230.000,00)		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	2.597.224.778,68

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula	Rp	56.042.620.700,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	8.539.145.050,00		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	64.581.765.750,00

b. Belanja barang dan jasa :

1) Semula	Rp	304.072.415.876,83		
2) Bertambah/berkurang	Rp	69.659.859.678,53		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	373.732.275.555,36

c. Belanja modal :

1) Semula	Rp	294.617.326.995,17		
2) Bertambah/berkurang	Rp	75.927.643.867,83		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	370.544.970.863,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp	70.211.263.977,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	82.731.983.735,36		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	152.943.247.712,36

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp	45.256.181.145,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	931.472.423,00		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	46.187.653.568,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp	70.211.263.977,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	82.731.983.735,36		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp	152.943.247.712,36

b. Pencairan dana cadangan :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perbahan			Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman			Rp	0,00

f. Penerimaan piutang daerah :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :

1) Semula	Rp	15.568.527.577,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(68.527.577,00)		
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp	15.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang :

1) Semula	Rp	29.687.653.568,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.000.000.000,00		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp	30.687.653.568,00

d. Pembayaran pinjaman daerah :

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00		
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IV	:	Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran V	:	Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran VI	:	Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII	:	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran VIII	:	Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Oktober 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

HERI SUPARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 11.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 07 OKTOBER 2013

KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**204,762,331,101,00**	**250,403,562,868,00**	**45,641,231,767,00**	**22.29%**
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	55,195,751,341,40	70,195,751,342,36	15,000,000,000,96	**27.18%**
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,975,670,003,00	19,505,094,143,00	(3,470,575,860,00)	**(15.11)%**
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,158,826,061,00	7,190,187,520,00	31,361,459,00	**0.44%**
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119,432,083,695,60	153,512,529,862,64	34,080,446,167,04	**28.54%**
4.2	**Dana Perimbangan**	**1,514,858,256,834,00**	**1,517,943,093,914,00**	**3,084,837,080,00**	**0.20%**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	111,727,599,834,00	114,812,436,914,00	3,084,837,080,00	**2.76%**
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,305,617,257,000,00	1,305,617,257,000,00	0,00	**0.00%**
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	97,513,400,000,00	97,513,400,000,00	0,00	**0.00%**
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**416,423,161,862,00**	**465,342,316,446,00**	**48,919,154,584,00**	**11.75%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	5,000,000,000,00	5,000,000,000,00	**100.00%**
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	**0.00%**
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	63,429,147,130,00	91,041,302,666,00	27,612,155,536,00	**43.53%**
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	312,364,014,732,00	298,168,442,500,00	(14,195,572,232,00)	**(4.54)%**
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	40,630,000,000,00	71,132,571,280,00	30,502,571,280,00	**75.07%**
	Jumlah Pendapatan	**2,136,043,749,797,00**	**2,233,688,973,228,00**	**97,645,223,431,00**	**4.57%**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,506,266,469,057,00**	**1,531,585,555,204,00**	**25,319,086,147,00**	**1.68%**
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,245,481,275,264,32	1,205,142,869,811,32	(40,338,405,453,00)	(3.24)%
5.1.2	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0.00%
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	5,033,704,200,00	0,00	(5,033,704,200,00)	(100.00)%
5.1.4	BELANJA HIBAH	170,910,942,000,00	222,618,000,000,00	51,707,058,000,00	30.25%
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	13,170,000,000,00	23,449,425,000,00	10,279,425,000,00	78.05%
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1,240,000,000,00	940,000,000,00	(300,000,000,00)	(24.19)%
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	65,872,092,814,00	76,838,035,614,00	10,965,942,800,00	16.65%
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,558,454,778,68	2,597,224,778,68	(1,961,230,000,00)	(43.02)%
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**654,732,363,572,00**	**808,859,012,168,36**	**154,126,648,596,36**	**23.54%**
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,042,620,700,00	64,581,765,750,00	8,539,145,050,00	15.24%
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	304,072,415,876,83	373,732,275,555,36	69,659,859,678,53	22.91%
5.2.3	BELANJA MODAL	294,617,326,995,17	370,544,970,863,00	75,927,643,867,83	25.77%
Jumlah Belanja		**2,160,998,832,629,00**	**2,340,444,567,372,36**	**179,445,734,743,36**	**8.30%**
Surplus/(Defisit)		**(24,955,082,832,00)**	**(106,755,594,144,36)**	**(81,800,511,312,36)**	**327.79%**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**70,211,263,977,00**	**152,943,247,712,36**	**82,731,983,735,36**	**117.83%**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	70,211,263,977,00	152,943,247,712,36	82,731,983,735,36	117.83%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0.00%
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0.00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0.00%
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0.00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**70,211,263,977,00**	**152,943,247,712,36**	**82,731,983,735,36**	**117.83%**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**45,256,181,145,00**	**46,187,653,568,00**	**931,472,423,00**	**2.06%**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0.00%
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,568,527,577,00	15,500,000,000,00	(68,527,577,00)	(0.44)%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	29,687,653,568,00	30,687,653,568,00	1,000,000,000,00	3.37%
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**45,256,181,145,00**	**46,187,653,568,00**	**931,472,423,00**	**2.06%**
	Pembiayaan Netto	**24,955,082,832,00**	**106,755,594,144,36**	**81,800,511,312,36**	**327.79%**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Ditetapkan di Cianjur
pada tangga 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
								Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja		
				Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1			2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9= 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13=12 - 9	14
2	01	01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	84,700,000,00	84,700,000,00	0,00	0.00	14,915,384,900,00	11,793,785,000,00	26,709,169,900,00	15,072,730,100,00	12,243,285,000,00	27,316,015,100,00	606,845,200,00	2.27
2	**02**		**KEHUTANAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**6,827,028,800,00**	**4,732,188,000,00**	**11,559,216,800,00**	**6,745,304,600,00**	**7,507,188,000,00**	**14,252,492,600,00**	**2,693,275,800,00**	**23.30**
2	02	01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0.00	6,827,028,800,00	4,732,188,000,00	11,559,216,800,00	6,745,304,600,00	7,507,188,000,00	14,252,492,600,00	2,693,275,800,00	23.30
2	**04**		**PARIWISATA**	**1,645,609,000,00**	**1,645,609,000,00**	**0,00**	**0.00**	**2,575,833,950,00**	**3,060,800,000,00**	**5,636,633,950,00**	**2,414,437,150,00**	**3,060,800,000,00**	**5,475,237,150,00**	**(161,396,800,00)**	**(2.86)**
2	04	01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,645,609,000,00	1,645,609,000,00	0,00	0.00	2,575,833,950,00	3,060,800,000,00	5,636,633,950,00	2,414,437,150,00	3,060,800,000,00	5,475,237,150,00	(161,396,800,00)	(2.86)
2	**05**		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**206,849,500,00**	**206,849,500,00**	**0,00**	**0.00**	**6,016,209,675,00**	**8,272,537,000,00**	**14,288,746,675,00**	**5,844,610,175,00**	**7,503,537,000,00**	**13,348,147,175,00**	**(940,599,500,00)**	**(6.58)**
2	05	01	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	206,849,500,00	206,849,500,00	0,00	0.00	6,016,209,675,00	8,272,537,000,00	14,288,746,675,00	5,844,610,175,00	7,503,537,000,00	13,348,147,175,00	(940,599,500,00)	(6.58)
2	**07**		**PERINDUSTRIAN**	**2,818,258,275,00**	**2,818,258,275,00**	**0,00**	**0.00**	**4,132,123,213,75**	**5,537,480,006,00**	**9,669,603,219,75**	**4,194,160,213,75**	**7,457,480,006,00**	**11,651,640,219,75**	**1,982,037,000,00**	**20.50**
2	07	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,818,258,275,00	2,818,258,275,00	0,00	0.00	4,132,123,213,75	5,537,480,006,00	9,669,603,219,75	4,194,160,213,75	7,457,480,006,00	11,651,640,219,75	1,982,037,000,00	20.50
Jumlah				**2,136,043,749,797,00**	**2,233,688,973,228,00**	**97,645,223,431,00**	**0.00**	**1,506,266,469,057,00**	**654,732,363,572,00**	**2,160,998,832,629,00**	**1,531,585,555,204,00**	**808,859,012,168,36**	**2,340,444,567,372,36**	**179,445,734,743,36**	**8.30**

Ditetapken di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
										Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
.07	2.07.01	16	16	5	2	3			Belanja Modal	247,165,000.00	247,165,000.00	0.00	0.00	
.07	***2.07.01***	***16***	***20***						***Penyusunan Roadmap Pembinaan Industri Hasil Tembakau***	***148,964,082.00***	***148,964,082.00***	***0.00***	***0.00***	
.07	2.07.01	16	20	5	2	1			Belanja Pegawai	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	
.07	2.07.01	16	20	5	2	2			Belanja Barang Dan Jasa	142,214,082.00	142,214,082.00	0.00	0.00	
									JUMLAH BELANJA	**9,669,603,219.75**	**11,651,640,219.75**	**1,982,037,000.00**	**20.50**	
									SURPLUS / DEFISIT	**(6,851,344,944,75)**	**(8,833,381,944,75)**	**1,982,037,000,00**	**0,00**	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode Rekening				Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang	
					Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	Rp	%
					Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1				2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
2.06	2.07.01	19	08	Pembangunan kios bagi Pedagang Kaki Lima di Eks - Terminal Muka Cianjur	6,975,000.00	6,100,000.00	270,674,000.00	283,749,000.00	8,100,000.00	6,100,000.00	270,674,000.00	284,874,000.00	1,125,000.00	0.40
2.07	**2.07.01**	**15**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**0.00**	**0.00**
2.07	2.07.01	15	14	Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	18,175,000.00	162,518,000.00	0.00	180,693,000.00	18,175,000.00	162,518,000.00	0.00	180,693,000.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	15	15	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Batik Cianjur	21,925,000.00	105,582,000.00	0.00	127,507,000.00	21,925,000.00	105,582,000.00	0.00	127,507,000.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	15	17	Pengembangan Briket Batubara Biomas	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625,000.00	177,375,000.00	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00
2.07	**2.07.01**	**16**		**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**0.00**	**0.00**
2.07	2.07.01	16	13	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Makro, Kecil menengah dengan Swasta	7,500,000.00	67,300,000.00	0.00	74,800,000.00	7,500,000.00	67,300,000.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	16	14	Peningkatan Kualitas produk IKM dan Desain Kemasan	13,475,000.00	86,525,000.00	0.00	100,000,000.00	13,475,000.00	86,525,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	16	16	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) / Tembakau Iris Sigaret (TIS)	16,225,000.00	136,610,000.00	247,165,000.00	400,000,000.00	16,225,000.00	136,610,000.00	247,165,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	16	20	Penyusunan Roadmap Pembinaan Industri Hasil Tembakau	6,750,000.00	142,214,082.00	0.00	148,964,082.00	6,750,000.00	142,214,082.00	0.00	148,964,082.00	0.00	0.00
2.07	**2.07.01**	**18**		**PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**404,400,000.00**	**626,159,800.00**	**0.00**	**1,030,559,800.00**	**0.00**	**0.00**
2.07	2.07.01	18	28	Pembangunan Pasar Tradisonal (DAK dan Pendamping Fisik)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	18	29	Pembangunan Pasar Tradisonal (Biaya Perencanaan dan Pengawasan DAK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07	2.07.01	18	30	Revitalisasi Pasar Tradisonal (Banprov 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL	**536,945,000.00**	**2,803,604,006.00**	**2,196,931,000.00**	**5,537,480,006.00**	589,620,000.00	3,545,129,006.00	3,322,731,000.00	7,457,480,006.00	1,920,000,000,00	34,67

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang	
				Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	Rp	%
				Pegawai	Barang dan	Modal		Pegawai	Barang dan	Modal			
1			2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
1	**24**		**Kearsipan**	**133,510,000.00**	**501,490,000.00**	**15,000,000.00**	**650,000,000.00**	**130,160,000.00**	**465,240,000.00**	**54,600,000.00**	**650,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1	24	01	Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah	133,510,000.00	501,490,000.00	15,000,000.00	650,000,000.00	130,160,000.00	465,240,000.00	54,600,000.00	650,000,000.00	0.00	0.00
2			**URUSAN PILIHAN**	**3,060,454,500.00**	**17,566,072,506.00**	**12,770,263,000.00**	**33,396,790,006.00**	**3,065,949,500.00**	**22,133,999,556.00**	**12,572,340,950.00**	**37,772,290,006.00**	**4,375,500,000.00**	**13.10**
2	**01**		**Pertanian**	**1,069,280,000.00**	**6,511,213,000.00**	**4,213,292,000.00**	**11,793,785,000.00**	**836,130,000.00**	**7,778,842,300.00**	**3,628,312,700.00**	**12,243,285,000.00**	**449,500,000.00**	**3.81**
2	01	01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1,069,280,000.00	6,511,213,000.00	4,213,292,000.00	11,793,785,000.00	836,130,000.00	7,778,842,300.00	3,628,312,700.00	12,243,285,000.00	449,500,000.00	3.81
2	**02**		**Kehutanan**	**467,655,000.00**	**3,622,161,000.00**	**642,372,000.00**	**4,732,188,000.00**	**705,215,000.00**	**5,781,744,000.00**	**1,020,229,000.00**	**7,507,188,000.00**	**2,775,000,000.00**	**58.64**
2	02	01	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	467,655,000.00	3,622,161,000.00	642,372,000.00	4,732,188,000.00	705,215,000.00	5,781,744,000.00	1,020,229,000.00	7,507,188,000.00	2,775,000,000.00	58.64
2	**04**		**Pariwisata**	**522,085,000.00**	**1,187,265,000.00**	**1,351,450,000.00**	**3,060,800,000.00**	**512,110,000.00**	**1,961,814,750.00**	**586,875,250.00**	**3,060,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
2	04	01	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	522,085,000.00	1,187,265,000.00	1,351,450,000.00	3,060,800,000.00	512,110,000.00	1,961,814,750.00	586,875,250.00	3,060,800,000.00	0.00	0.00
2	**05**		**Kelautan Dan Perikanan**	**464,489,500.00**	**3,441,829,500.00**	**4,366,218,000.00**	**8,272,537,000.00**	**422,874,500.00**	**3,066,469,500.00**	**4,014,193,000.00**	**7,503,537,000.00**	**(769,000,000.00)**	**(9.30)**
2	05	01	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	464,489,500.00	3,441,829,500.00	4,366,218,000.00	8,272,537,000.00	422,874,500.00	3,066,469,500.00	4,014,193,000.00	7,503,537,000.00	(769,000,000.00)	(9.30)
2	**07**		**Perindustrian**	**536,945,000.00**	**2,803,604,006.00**	**2,196,931,000.00**	**5,537,480,006.00**	**589,620,000.00**	**3,545,129,006.00**	**3,322,731,000.00**	**7,457,480,006.00**	**1,920,000,000.00**	**34.67**
2	07	01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	536,945,000.00	2,803,604,006.00	2,196,931,000.00	5,537,480,006.00	589,620,000.00	3,545,129,006.00	3,322,731,000.00	7,457,480,006.00	1,920,000,000.00	34.67

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

07 1 12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	3,764,194,500,00	4,004,194,500,00	240,000,000,00	6.38
08	**Pariwisata dan budaya**	**3,060,800,000.00**	**3,060,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
08 2 04	PARIWISATA	3,060,800,000,00	3,060,800,000,00	0,00	0.00
10	**Pendidikan**	**126,387,695,417.00**	**138,271,274,017.00**	**11,883,578,600.00**	**9.40**
10 1 01	PENDIDIKAN	126,387,695,417,00	138,271,274,017,00	11,883,578,600,00	9.40
11	**Perlindungan sosial**	**5,406,865,000.00**	**6,255,065,000.00**	**848,200,000.00**	**15.69**
11 1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,000,000,000,00	3,518,200,000,00	518,200,000,00	17.27
11 1 13	SOSIAL	2,406,865,000,00	2,736,865,000,00	330,000,000,00	13.71

Ditetap di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 07 OKTOBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	2	0	2
Golongan IV/c	0	16	0	0	0	14	1	31
Golongan IV/b	0	17	42	1	0	400	5	465
Golongan IV/a	0	6	115	82	2	5,784	4	5,993
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**39**	**157**	**83**	**2**	**6,200**	**10**	**6,491**
Golongan III/d	0	0	42	312	2	680	31	1,067
Golongan III/c	0	0	12	328	16	496	93	945
Golongan III/b	0	0	0	224	57	937	439	1,657
Golongan III/a	0	0	0	57	98	1,458	556	2,169
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**54**	**921**	**173**	**3,571**	**1,119**	**5,838**
Golongan II/d	0	0	0	0	2	208	148	358
Golongan II/c	0	0	0	0	1	269	364	634
Golongan II/b	0	0	0	0	0	685	461	1,146
Golongan II/a	0	0	0	0	0	136	441	577
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1,298**	**1,414**	**2,715**
Golongan I/d	0	0	0	0	0	1	58	59
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	49	49
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	64	64
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	15	15
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**186**	**187**
TOTAL	**0**	**39**	**211**	**1,004**	**178**	**11,070**	**2,729**	**15,231**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode						Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2012		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2012	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2013	
							APBD TA 2012	Perubahan APBD TA 2012		APBD	Perubahan APBD
2						3	4	5	6	7	8
1	02	1.02.02	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)				0.00	12,888,040,756.36
1	02	1.02.03	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)				0.00	45,215,739.00
							0.00	0.00		0.00	0.00
						Pelampuan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
						Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
						Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga	7,122,247,098.50	5,779,605,505.81	0.00	29,687,653,568.00	30,687,653,568.00
						Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00
						1. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung				0.00	18,012,454,150.00
						2. Belanja Barang dan jasa				0.00	55,837,713,429.00
						Penghematan Belanja dan Opertarget Pendapatan	0.00	39,696,497,813.70	0.00	0.00	0.00
						Belanja Tidak Terduga	6,614,733,100.00	976,638,269.73	0.00	0.00	0.00
JUMLAH							**68,352,612,344.50**	**101,880,869,997.24**	**0.00**	**70,211,263,977.00**	**152,943,247,712.36**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2011 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2012 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2012 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2013 (Rp)	
		APBD TA 2011	Perubahan APBD TA 2011		APBD TA 2012	Perubahan APBD TA 2012		APBD	PERUBAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bansos	8,838,496,000.00	8,838,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga	11,646,117,648.00	11,718,057,648.00	0.00	7,122,247,098.50	5,779,605,505.81	0.00	29,687,653,568.00	30,687,653,568.00
	Tambahan Penghasilan Disdik	17,273,533,050.00	17,273,533,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penghematan Belanja dan Opertarget Pendapatan	18,537,581,041.00	18,537,581,041.00	0.00	0.00	39,696,497,813.70	0.00	0.00	0.00
	BLUD	0.00	7,234,671,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	6,614,733,100.00	976,638,269.73	0.00	0.00	0.00
	Pelampuan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00
	1. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,012,454,150.00
	2. Belanja Barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,837,713,429.00
	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
JUMLAH		**114,038,931,194.00**	**121,391,827,438.29**	**0.00**	**68,352,612,344.50**	**101,880,869,997.24**	**0.00**	**70,211,263,977.00**	**152,943,247,712.36**

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 07 OKTOBER 2013

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah	Bunga	pokok Pinjaman Daerah	Bunga
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 07 Oktober 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH